

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat¹. Namun pada umumnya di negara berkembang seperti di Indonesia masih terdapat sebuah dualisme regional, artinya ketidakseimbangan tingkat pembangunan antardaerah dalam suatu negara tersebut. Sehingga diperlukan suatu strategi pembangunan regional yang sesuai dengan karakter, kapasitas dan keunggulan masing-masing wilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah yang menghambat kemajuan pembangunan ekonominya.

Untuk itu, pemerintah pusat menetapkan sebuah Undang-undang dalam upaya pemerataan pembangunan yaitu Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait tentang Pemerintah Daerah; Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan ditetapkannya Undang - undang tersebut maka akan terciptanya suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang diharapkan dapat mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

¹Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan Edisi Kedua*, (Jakarta: KENCANA, 2006) hal 3

Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Pemberian otonomi daerah tercermin di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, serta peran aktif masyarakat dalam mengoptimalkan pendayagunaan potensi daerah akan semakin meningkat sehingga akan berkurangnya suatu ketimpangan antar daerah.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak dipulau Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3,25 juta hektar. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Persentase (%)
Kabupaten			
1.	Cilacap	2.124,47	6,48
2.	Banyumas	1.335,30	4,07
3.	Purbalingga	677,55	2,07
4.	Banjarnegara	1.023,73	3,12
5.	Kebumen	1.211,74	3,69
6.	Purworejo	1.091,49	3,33
7.	Wonosobo	981,41	2,99
8.	Magelang	1.102,93	3,36
9.	Boyolali	1.008,45	3,07
10.	Klaten	658,12	2,01
11.	Sukoharjo	489,12	1,49
12.	Wonogiri	1.793,67	5,47
13.	Karanganyar	775,44	2,36
14.	Sragen	941,54	2,87
15.	Grobogan	2.013,86	6,14
16.	Blora	1.804,59	5,50
17.	Rembang	887,13	2,70
18.	Pati	1.489,19	4,54
19.	Kudus	425,15	1,30
20.	Jepara	1.059,25	3,23
21.	Demak	900,12	2,74
22.	Semarang	950,21	2,90
23.	Temanggung	837,71	2,55
24.	Kendal	1.118,13	3,41
25.	Batang	788,65	2,40
26.	Pekalongan	873,00	2,55
27.	Pemalang	1.118,13	3,41
28.	Tegal	873,71	2,67
29.	Brebes	1.902,37	5,80
Kota			
1.	Magelang	16,06	0,05
2.	Surakarta	46,01	0,14
3.	Salatiga	57,36	0,17
4.	Semarang	373,78	1,14
5.	Pekalongan	45,25	0,14
6.	Tegal	39,68	0,12
Jawa Tengah		32,800,69	100

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2019

Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,48% dariluas Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap tentu bukan daerah tanpa potensi.

Topografi wilayah yang beragam berupa kesatuan daerah pantai, hutan, dataran rendah, serta dataran perbukitan yang tentu saja menyediakan kekayaan sumber daya alam. Dimana secara geografis Kabupaten Cilacap berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan merupakan pintu gerbang internasional pantai selatan Jawa dengan pelabuhan lautnya sehingga Kabupaten Cilacap memiliki potensi dan prospek perkembangan yang besar.

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 Kecamatan; 269 Desa; 15 Kelurahan; 2.319 Rukun Warga (RW) dan 10.463 Rukun Tetangga (RT). Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW Kabupaten Cilacap

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	RT	RW	Luas Wilayah (Ha)
1.	Dayeuluhur	14	-	386	118	18.506,10
2.	Wanareja	16	-	665	182	18.973,31
3.	Majenang	17	-	785	167	13.856,19
4.	Cimanggu	15	-	446	107	16.744
5.	Karangpucung	14	-	417	107	11.512,43
6.	Cipari	11	-	363	80	12.148
7.	Sidareja	10	-	293	54	5.495,48
8.	Kedungreja	11	-	485	93	7.143
9.	Patimuan	7	-	322	79	7.530
10.	Gandrungmangu	14	-	583	88	14.319,40
11.	Bantarsari	8	-	410	67	9.554
12.	Kawunganten	12	-	468	80	11.743
13.	Kampong Laut	4	-	128	39	14.598
14.	Jeruklegi	13	-	432	83	9.679,46
15.	Kesugihan	16	-	690	156	8.230,62
16.	Adipala	16	-	515	118	6.118,68
17.	Maos	10	-	263	66	2.804,15
18.	Sampang	10	-	228	72	2.730,13
19.	Kroya	17	-	550	111	5.883,39
20.	Binangun	17	-	363	110	5.142,43
21.	Nusawungu	17	-	452	119	6.126,44
22.	Cilacap Selatan	-	5	447	73	910,61
23.	Cilacap Tengah	-	5	421	80	2.217,20
24.	Cilcapa Utara	-	5	351	70	1.883,83
Jumlah		269	15	10.463	2.319	213.850

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka 2019, diolah

Berdasarkan hal tersebut di atas, tentu saja menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap terkait pembangunan dan pertumbuhan daerahnya secara merata. Namun nyatanya, wilayah yang terlalu luas dengan jumlah penduduk yang banyak menyebabkan rentang kendali pemerintahan menjadi kurang optimal. Beberapa infrastruktur bangunan dan kelengkapan pelayanan masyarakat juga mengalami ketimpangan antar wilayah. Luasnya wilayah Kabupaten Cilacap kemudian juga memunculkan permasalahan jarak tempuh bagi warga yang tinggal di wilayah pinggiran untuk menuju ke pusat pemerintahan.

Oleh karenanya, salah satu isu yang menarik paska runtuhnya orde baru pada tahun 1998 adalah maraknya pemekaran daerah yang terjadi pada tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota. Pemekaran daerah kemudian dianggap sebagai suatu hal yang lazim dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Disamping itu, pemekaran daerah sejalan dengan fungsi substantif dari keberadaan pemerintahan, yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga pemerintah perlu semakin dekat dengan masyarakatnya sehingga dapat memberikan respon secara cepat terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Untuk itu, sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap pun telah mewacanakan adanya pemekaran daerah menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Cilacap Barat yang meliputi 10 kecamatan (Dayeuhluhur, Wanareja,

Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, Sidareja, Kedungreja, Patimuan, dan Cipari). Pemekaran daerah ini diwacanakan dengan tujuan sebagai sarana untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Wacana pemekaran daerah Cilacap Barat telah bergulir sejak tahun 2006 silam. Artinya, wacana pemekaran Cilacap Barat telah berkembang selama lebih dari 10 tahun. Selama kurun waktu tersebut, berbagai langkah dan prosedur telah ditempuh oleh pihak-pihak terkait yang menginginkan terwujudnya pemekaran Cilacap Barat. Lamanya proses pemekaran daerah tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun eksternal. Selain itu, selama proses pemekaran bergulir, pastinya juga terjadi banyak dinamika dan perubahan pada masyarakat, baik dalam segi sosial maupun politik.

Dengan adanya suatu wacana pemekaran daerah di Kabupaten Cilacap yang bertujuan sebagai upaya pemerataan pembangunan dalam mengurangi tingkat ketimpangan antar daerah, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan yaitu mengkaji dan menganalisis karakter pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama dalam ruang masing-masing kecamatan di Kabupaten Cilacap. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Perda Kabupaten Cilacap Nomor 9 pasal 5 dan pasal 6 (2011) menetapkan kebijakan tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Cilacap tahun 2011-2031 dalam hal ini

tentang rencana sistem pusat kegiatan dan rencana sistem perkotaan yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal) yang meliputi kawasan perkotaan Kroya dan kawasan perkotaan Majenang. PKL berfungsi sebagai pusat pelayanan umum, pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi dan distribusi hasil – hasil bumi dari kecamatan – kecamatan yang menjadi wilayah pengaruhnya. Untuk mendukung fungsi tersebut maka fasilitas yang harus ada adalah fasilitas pelayanan umum serta perdagangan dan jasa skala kecamatan dengan ditunjang oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) direncanakan memiliki skala pelayanan satu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang terdiri dari gabungan beberapa kecamatan yang ada di dalamnya.

Sebagai salah satu Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap pastinya memiliki berbagai macam potensi di setiap wilayah dengan adanya perbedaan lokasi geografisnya. Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan adanya berbagai upaya pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap , studi tentang pengamatan terhadap pola pertumbuhan di masing-masing wilayah di Kabupaten Cilacap merupakan suatu kebutuhan bagi perencanaan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Untuk itu, penulis akan mengidentifikasi pola pertumbuhan dan daya saing sektoralnya dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang nantinya dapat diketahui daerah mana yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **“Analisis Potensi**

Pengembangan dan Daya Saing Satuan Wilayah Pembangunan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Kabupaten Cilacap” diharapkan dapat teridentifikasi pola pertumbuhan serta potensi pengembangan dalam SWP sebagai wilayah PKL baru dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Cilacap yang saat ini hanya meliputi 2 kawasan perkotaan. Dengan adanya wilayah PKL baru maka diharapkan nantinya wilayah dalam SWP dapat saling mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung akan menciptakan pembangunan yang merata dan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:

1. Daerah manakah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Cilacap yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berdasarkan tipologi daerahnya?
2. Bagaimana daya saing sektoral antar kecamatan di Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui daerah manakah dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) di Kabupaten Cilacap yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal berdasarkan tipologi daerahnya.
2. Untuk mengetahui bagaimana daya saing sektoral antar kecamatan di Kabupaten Cilacap.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dimana hanya terfokus atau terbatas pada kajian data selama rentang periode lima tahun, yaitu tahun 2014 – 2018. Kajian tersebut terkait analisis tipologi wilayah/daerah dan daya saing sektoral dalam perekonomian antar wilayah/daerah pada tahun 2018.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diberikan yaitu:

1. Manfaat teoritis

Menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu ekonomi tentang Ekonomi Regional yaitu mengenai kebijakan pembangunan yang digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Cilacap.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai masukan dan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi daerahnya.

- b. Sebagai sumber informasi untuk para peneliti lain terutama yang tertarik dalam bidang ekonomi regional dengan ruang lingkup dan kajian yang berbeda.